

**PENGARUH KETERSEDIAAN BARANG PUBLIK DAN
SIKAP PATRIOTISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwokerto)



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Monique Ivanka Dewi

No. Mahasiswa: 18312276

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**PENGARUH KETERSEDIAAN BARANG PUBLIK DAN SIKAP
PATRIOTISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwokerto)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Monique Ivanka Dewi

No. Mahasiswa: 18312276

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 07 Juli 2022

Penulis,



(Monique Ivanka Dewi)

**PENGARUH KETERSEDIAAN BARANG PUBLIK DAN SIKAP
PATRIOTISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwokerto)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Monique Ivanka Dewi

No. Mahasiswa: 18312276

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11 Juli 2022

Dosen Pembimbing,



(Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Ketersediaan Barang Publik dan Sikap Patriotisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

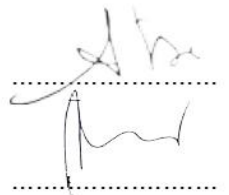
Disusun oleh : MONIQUE IVANKA DEWI

Nomor Mahasiswa : 18312276

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 09 Agustus 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Penguji : Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Ariefin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

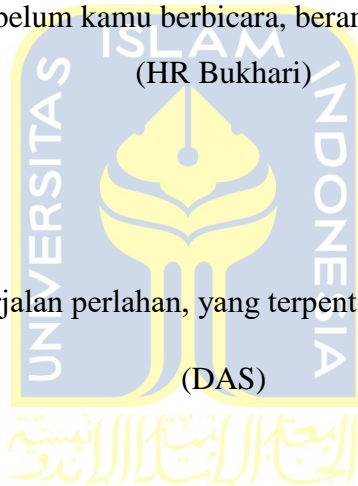
MOTTO

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

(QS. At-Taubah:105)

“Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas.”

(HR Bukhari)



“Tidak masalah berjalan perlahan, yang terpenting adalah tidak berhenti.”

(DAS)

“Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.”

(Tony Robbins)

“Make your own magic.”

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur atas kehadiran Allah dengan segala karunia, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Ketersediaan Barang Publik dan Sikap Patriotisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**" disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam memberi jalan kemudahan dan Maha Mendengar atas segala doa-doa yang dipanjatkan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi penulis dalam memperbaiki diri sebagai seorang muslim.
3. Orang tua tercinta, Papah Wiluyatmo dan Mamah Dedes Sutarni yang selalu mendoakan dan memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta perhatiannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan baik.
6. Bapak Jaka Sriyana SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada seluruh dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
9. Adik tersayang, Ernestantya Dinda Dewi yang selalu menemani dan menghibur penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar baik di Purwokerto maupun Purworejo, terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan.
11. Dhimas Adilatif Suryadani, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah kapanpun dan dimanapun, memberikan semangat juga motivasi yang besar sehingga penulis mampu bangkit dari keterpurukan.
12. Sahabat tercinta Elvara, Irba, Dewi, Galuh, Asyifa, Afina, Diva, Venny, Anggun, Yana yang selalu memberikan semangat dan doanya selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan semasa kuliah Annisa, Fyka, Iqlima yang selalu mengerti kondisi penulis baik dalam suka maupun duka selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan karunia bagi Bapak, Ibu, Saudara/i, dan juga kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam hal apapun.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik maupun saran akan sangat diterima guna penyempurnaan penulisan skripsi ini dikemudian hari. Semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat menambah wawasan serta informasi bagi pembacanya.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh



Yogyakarta, 11 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monique', is placed below the text 'Penulis,'.

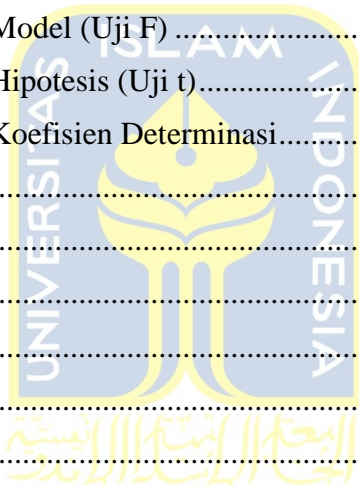
(Monique Ivanka Dewi)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstraksi	xvi
<i>Abstract</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel	9
2.1.1 Kajian Teori Dasar.....	9
2.1.2 Pajak	9
2.1.2.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	10
2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	12
2.1.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.3 Barang Publik	14
2.1.4 Sikap Patriotisme	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Hipotesis Penelitian	25

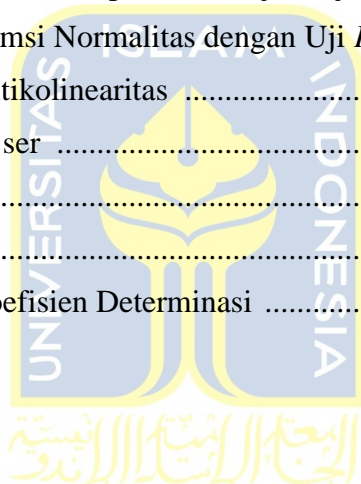
2.3.1 Ketersediaan Barang Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	25
2.3.2 Sikap Patriotisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi....	26
2.3.3 Ketersediaan Barang Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sikap Patriotisme sebagai Variabel Pemoderasi	26
2.4 Kerangka Penelitian.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	28
3.2 Populasi dan Sampel.....	28
3.2.1 Populasi	28
3.2.2 Sampel	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	29
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	30
3.4.1 Variabel Independen (X)	30
3.4.1.1 Ketersediaan Barang Publik	30
3.4.1.2 Sikap Patriotisme.....	30
3.4.2 Variabel Dependen (Y).....	31
3.4.3 Variabel Pemoderasi (Z).....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.6.1 Validitas dan Reliabilitas.....	33
3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	34
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	34
3.6.3.1 Uji Normalitas	34
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	35
3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas	35
3.6.4 Analisis Regresi Berganda.....	36
3.6.5 Uji Model (Uji F).....	37
3.6.6 Uji Hipotesis (Uji t)	37
3.6.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Analisis Validitas dan Reliabilitas.....	39
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.1.2.1 Karakteristik Responden	41
4.1.2.2 Variabel Penelitian	42
4.1.3 Analisis Asumsi Klasik.....	45
4.1.3.1 Uji Normalitas	45
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas	46
4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas	47
4.1.4 Analisis Regresi	48
4.1.4.1 Uji Model (Uji F)	48
4.1.4.2 Uji Hipotesis (Uji t).....	49
4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi.....	51
4.2 Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	54
Daftar Pustaka	xviii
Lampiran	xix



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.....	2
Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Kabupaten Banyumas	3
Tabel 2.1 Ringkasan Kajian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Hasil Analisis Validitas Indikator Variabel Penelitian	40
Tabel 4.2 Hasil Analisis Reliabilitas Variabel	40
Tabel 4.3 Karakteristik Responden	41
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Ketersediaan Barang Publik	43
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sikap Patriotisme	43
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Asumsi Normalitas dengan Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser	47
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	48
Tabel 4.11 Hasil Uji t	49
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	27
Gambar 4.1 Grafik Normal <i>P-Plot</i>	45
Gambar 4.2 Grafik <i>Scatter-Plot</i>	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner

Lampiran 2: Data Hasil Rekapitan Jawaban Responden

Lampiran 3: Klasifikasi Data Responden

Lampiran 4: Hasil Analisis Statistik

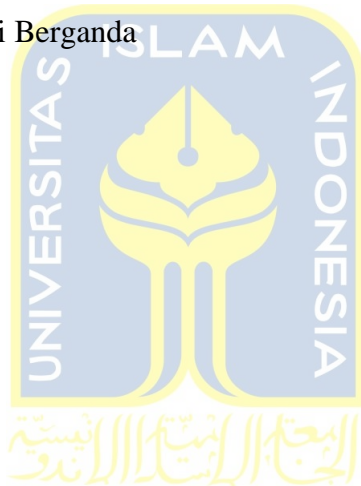
Lampiran 5: Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 6: Uji Normalitas

Lampiran 7: Uji Multikolinearitas

Lampiran 8: Uji Heterokedastisitas

Lampiran 9: Uji Regresi Berganda

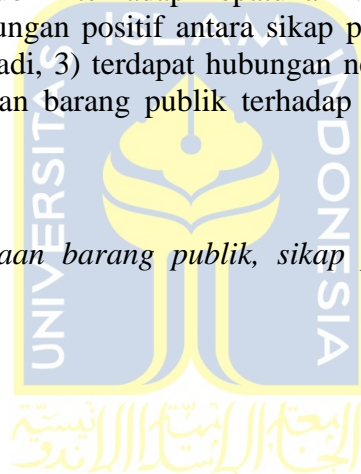


Abstraksi

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak serta mengetahui hubungan sikap patriotisme dalam memengaruhi variabel ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel yang dilakukan yaitu dengan *purposive sampling*, yaitu siapa saja dapat berpartisipasi sesuai dengan kriteria yang dinilai representatif atas populasi yang dipilih oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan *platform digital online* melalui *Google Form* dengan jumlah responden sebanyak 100 orang Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan aplikasi SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat hubungan positif antara ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) terdapat pengaruh hubungan positif antara sikap patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) terdapat hubungan negatif sikap patriotisme dalam memoderasi ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: ketersediaan barang publik, sikap patriotisme, kepatuhan wajib pajak

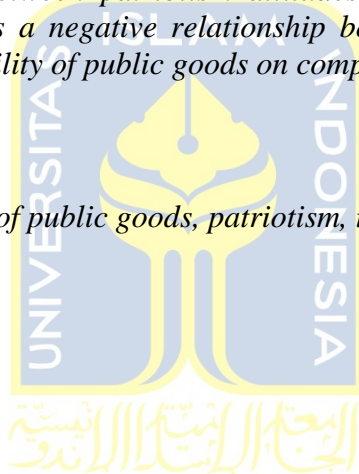


Abstract

This study aims to determine the effect of the availability of public goods and the attitude of patriotism on taxpayer compliance and to determine the relationship of patriotism in influencing the variable availability of public goods on individual taxpayer compliance. The sampling method used is purposive sampling, anyone can participate in accordance with the criteria that are considered representative of the population selected by the researcher. The data collection technique uses an online digital platform via Google Form with a total of 100 taxpayers registered at KPP Pratama Purwokerto. This research is quantitative research using Multiple Linear Regression Analysis Technique with the help of SPSS application.

The results show that 1) there is a positive relationship between the availability of public goods on individual taxpayer compliance, 2) there is a positive relationship between patriotism attitudes towards individual taxpayer compliance, 3) there is a negative relationship between patriotism attitudes in moderating the availability of public goods on compliance. individual taxpayers.

Keywords: availability of public goods, patriotism, taxpayer compliance



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data yang tercatat dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2022) hingga pada akhir tahun 2021 Pendapatan Negara yang terealisasi mampu bertumbuh sebesar Rp2.003,1 triliun dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun. Hal tersebut mengindikasikan kinerja yang baik pada optimalisasi APBN 2021 karena telah mencapai target sebesar 114,9% yang diharapkan akan menjadi pemulihan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin kuat dan mampu bersaing dengan negara lainnya dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Indeks kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang direalisasikan melalui sumber pendapatan negara berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak sendiri diartikan sebagai kontribusi warga negara yang terutang bagi orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan dalam menyelenggarakan kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat.

Sedangkan kepatuhan pajak sendiri didefinisikan sebagai suatu sikap yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam memastikan terpenuhinya kewajiban sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang telah disebutkan sebelumnya.

Kepatuhan dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh adanya motivasi yang mendorong untuk melakukan suatu sikap maupun perilaku patuh. Selain itu, kepatuhan dari diri seorang Wajib Pajak juga akan ditimbulkan karena adanya pengetahuan yang secara subjektif atau berdasarkan apa yang dilihat oleh masyarakat saja. Hal tersebut berarti bahwa Wajib Pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya untuk kemudian mendapatkan hak atas suatu kebijakan publik (Rahayu, 2019).

Hakikatnya, negara yang makmur adalah negara yang ditentukan melalui kepatuhan pajak warga negara itu sendiri. Pembangunan yang maju akan dapat dicapai apabila pendapatan pajak dapat terus meningkat melalui strategi pemerintah dan juga aparat pajak dalam menyadarkan para masyarakat bahwa pajak digunakan sebaik-baiknya kepentingan seluruh warga Indonesia.

Berikut adalah data yang menunjukkan realisasi rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Tabel 1.1
Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2016	72,5	61
2	2017	75	73
3	2018	80	71
4	2019	85	73
5	2020	80	78

Sumber: (Kemenkeu, 2021)

Dari data pada tabel tersebut, pada 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu berada di bawah target yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor yang dapat

memengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih selalu berada di bawah target setiap tahunnya.

Namun demikian, pendapatan pajak pada tiap daerah maupun kabupaten yang tersebar di Indonesia berbeda-beda realisasinya. Semakin anggaran dapat tercapai maka mengindikasikan daerah maupun kabupaten yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memenuhi hak bagi masyarakatnya dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang bersifat publik. Seperti yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menerapkan mekanisme penetapan *self-assessment system* (perhitungan sendiri oleh wajib pajak) dan *official-assessment* (penetapan oleh aparat pajak) kerap terjadi perubahan di setiap tahunnya. Menurut LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Banyumas Tahun 2020, adapun detail anggaran dan realisasi pajak seperti yang terjadi seperti di bawah ini.

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Kabupaten Banyumas

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	122.950.000.000,-	147.356.151.979,-
2	2017	165.650.000.000,-	199.612.343.442,-
3	2018	200.200.000.000,-	211.550.291.844,-
4	2019	219.150.000.000,-	229.377.285.773,-
5	2020	206.558.325.460,-	208.624.349.832,-

Sumber: LKPD Kab. Banyumas (Pemekab Banyumas, 2020)

Dari data pada tabel tersebut, 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mencapai targetnya yaitu 119,85% pada tahun 2016; 120,50% pada tahun 2017; 105,67% pada tahun 2018; 104,67% pada tahun 2019; dan 101,00% pada tahun 2020.

Jika dikaitkan pada kepatuhan para wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto (Pemerintah Kabupaten Banyumas) terhadap persentase ketercapaian target anggaran, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Banyumas secara konsisten memiliki kepatuhan pajak yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari persentase realisasi yang mampu mencapai 100% di setiap tahunnya. Bahkan pada awal tahun 2020 di mana sudah menjadi tahun yang terdampak pandemi Covid-19, kepatuhan pajak di Kabupaten Banyumas tetap mencapai 100%, tepatnya 101,00%.

Hingga saat ini telah banyak faktor yang dinilai dapat mempengaruhi menurun atau meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam penelitian (Anggraini, 2018) disebutkan bahwa perilaku individu, motivasi, dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dalam penelitian (Arviana & Djeni, 2021) yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atau efektivitas perpajakan. Berbeda faktor, dalam (Utari et al., 2020) didapatkan hasil penelitian bahwa struktur organisasi, *Business Process* dan teknologi informasi serta komunikasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan kesadaran wajib pajak dinilai dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hingga pada penelitian (Alshira'h et al., 2021) dan (Carrillo et al., 2021) yang menyebutkan bahwa ketersediaan barang publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak masing-masing di Yordania dan Kota madya Argentina.

Namun, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan terdapat variabel faktor yang belum terbukti hubungannya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu faktor ketersediaan barang publik. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil penelitian yang mengaitkan antara sikap patriotisme mendorong penulis untuk meneliti apakah sikap patriotisme akan terbukti berpengaruh seperti dalam penelitian (Alshira'h et al., 2021; Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020) atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali seperti hasil penelitian (Mayapada et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penulis untuk mengadopsi penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pertama, terkait pengaruh ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan pajak yang sebelumnya pernah diteliti di banyak negara di luar. Kedua, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali sikap patriotisme yang sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa daerah Indonesia sehingga akan dinilai lebih menggambarkan situasi dan kondisi saat ini. Ketiga, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme merupakan faktor yang menjadikan Kabupaten Banyumas berhasil dalam mencapai kepatuhan pajak yang maksimal atau tidak. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran Pemerintah Daerah lain yang memiliki tingkat kepatuhan pajak masih terbilang minim. Sehingga dikemudian hari dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kepatuhan pajak Pemerintah Daerah lain,

dengan demikian secara keseluruhan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka judul pada penelitian ini adalah “Pengaruh Ketersediaan Barang Publik dan Sikap Patriotisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah ketersediaan barang publik berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sikap patriotisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sikap patriotisme sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat hubungan antara ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui sejauh mana sikap patriotisme sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat hubungan antara ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang akan diperoleh dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas kajian mengenai keterkaitan ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - b. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi para peneliti yang mengkaji tentang kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Sebagai sarana dalam memperoleh gelar kesarjanaan sekaligus mengimplementasikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
 - b. Bagi Wajib Pajak
Dapat meningkatkan kesadaran dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.
 - c. Bagi KPP Purwokerto (Pemerintah Kabupaten Banyumas)
Sebagai referensi untuk dapat meningkatkan strategi dan pengelolaan pajak secara optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
 - d. Bagi Pembaca
Mampu meningkatkan pengetahuan yang relevan pada masa kini.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai populasi dan sampel, variabel penelitian, dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan atas hasil analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran serta keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Kajian Teori Dasar

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana (*theory of planned behaviour*) yang dikembangkan oleh Ajzen. Dalam teori perilaku terencana, seseorang dinilai akan mempertimbangkan sikap, norma subjektif, dan juga keyakinan pribadi dalam mendorong adanya niat untuk mematuhi aturan yang berlaku (Ajzen, 1991). Adapun kaitannya pada penelitian ini yaitu bahwa seseorang akan menentukan untuk bersikap patuh ataupun tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hingga saat ini, pajak memiliki peran sangat penting bagi pendapatan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan yang bersifat pasti dalam memberi kontribusi dana negara dan merupakan

cerminan sikap kegotongroyongan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) dalam pembiayaan negara yang kemudian di atur dalam peraturan perundang-undangan (Adinata, 2015).

Berdasarkan pengertian tersebut, adapun fungsi pajak bagi negara Indonesia, pertama yaitu sebagai fungsi budgetair. Artinya, pajak akan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah, sehingga jika kontribusi penerimaan pajak dalam APBN setiap tahunnya meningkat maka akan menunjukkan bahwa peran pajak dalam APBN juga semakin besar (Oktaviani et al., 2017). Kedua, pajak memiliki fungsi pengatur (*regulative*) yang berarti bahwa pajak merupakan suatu alat pengatur dalam berjalannya kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, tanpa adanya penerimaan negara yang sebagian besarnya berasal dari pajak maka kebijakan maupun program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal untuk mencapai tujuan negara yang adil dan Makmur (Sinaga, 2016).

2.1.2.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Berikut adalah kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang KUP mengenai hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai Wajib Pajak:

1. Mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Wajib Pajak terkait

untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Pasal 2 Ayat 1).

2. Wajib Pajak yang bertindak sebagai pengusaha yang dikenai pajak wajib melaporkan usahanya di DJP pada wilayah kerjanya meliputi tempat domisili untuk kemudian dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 Ayat 2).
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar (Pasal 3 Ayat 1).
4. Membayar atau menyetor pajak terutang Wajib Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 10 Ayat 1).
5. Membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Pasal 12 Ayat 1).
6. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 Ayat 1).

Disamping kewajibannya, menurut Undang-Undang KUP Wajib Pajak juga memiliki haknya, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 Ayat 1).
2. Hak kerahasiaan (Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 41 Ayat 1)
3. Dalam kondisi tertentu, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran maupun penundaan pembayaran pajak (Pasal 21 Ayat 5)
4. Dengan alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan (Pasal 3 Ayat 4).
5. Dengan alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.
6. Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang.
7. Mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan PPh (Pasal 1 Ayat 34).
8. Hak pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17D Ayat 1 dan 2).
9. Hak mendapatkan pajak yang ditanggung oleh pemerintah.
10. Hak memperoleh insentif perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Pada tahun 1984 pemerintah Indonesia melakukan suatu reformasi atas sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan terjadi salah satunya terhadap sistem pemungutan pajak yang semula *official assessment system* menjadi *self-assessment system* (Diamastuti, 2018). Penerapan *self-assessment system* merupakan bentuk kepercayaan otoritas pajak kepada wajib pajak untuk melaksanakan masing-masing kewajiban perpajakan yang meliputi menghitung pajak, membayar pajak, dan juga melaporkan pajaknya yang dilakukan secara mandiri. Selanjutnya Dirjen Pajak hanya bersifat mengawasi dan memastikan para Wajib Pajak apakah sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku atau belum. Oleh karenanya, Wajib Pajak kemudian dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sejujur-jujurnya guna memperbaiki kualitas perpajakan di Indonesia sendiri. Apabila ditemukan wajib pajak yang melakukan tindakan memanipulasi atau melakukan penghindaran pajak secara ilegal akan dijatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Satyawati & Cahjono, 2017), ciri-ciri *self-assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang dalam penentuan besar pajak terutang terdapat pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak berpartisipasi secara aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya.

3. Fiskus tidak berhak ikut campur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena sifatnya hanya mengawasi.

Diterapkannya *self-assessment system* di Indonesia sangat berperan untuk menuntut wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan tercapai keberhasilan pengumpulan pajak (Lasmaya & Fitriani, 2017).

2.1.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merujuk pada kata disiplin, taat dan tunduk pada suatu aturan yang berlaku. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan hal yang penting guna mengoptimalkan penerimaan pajak suatu negara (Arviana & Djani, 2021). Artinya, harus ada kesadaran bagi Wajib Pajak akan hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib Pajak akan dikatakan patuh jika Wajib Pajak secara penuh melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di dalam diri Wajib Pajak terdapat sikap patuh maka target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dengan mudah dicapai, selain itu juga dapat mengurangi adanya tindak kecurangan dalam hal berjalannya aktivitas perpajakan.

2.1.3 Barang Publik

Ruang lingkup dalam pelayanan publik yaitu meliputi pelayanan barang dan jasa publik serta pelayanan bersifat administratif yang

kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup yang dimaksud atas pelayanan publik terdiri atas pendidikan, pekerjaan dan usaha, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, jaminan kesehatan, jaminan sosial, pariwisata serta sektor strategis lainnya yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009). Sehingga adanya ketersediaan pelayanan publik menjadi urgensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah guna menunjang kehidupan masyarakat banyak (Jazuli & Fatimah, 2019).

Barang publik seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, air bersih, dan juga tempat pariwisata misalnya, memiliki karakteristik yaitu *non-rival* dan *non-excludable* (Andhika, 2017). Non-rival yang berarti bahwa konsumsi yang dinikmati seorang individu tidak akan mempengaruhi manfaat untuk individu lainnya, sedangkan non-excludable berarti bahwa tidak dapat seorang individupun untuk menghalangi akses untuk individu lainnya terhadap barang publik tersebut dengan kata lain tidak ada pengecualian dari penggunaan barang publik apapun yang disediakan pemerintah.

Penyediaan atas pelayanan barang publik sendiri dilaksanakan oleh (1) instansi pemerintah baik itu dana sumbernya berasal dari APBN dan/APBD, (2) juga dapat dilaksanakan oleh badan usaha baik dari modal yang bersumber dari kekayaan negara dan/kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (3) diluar dari sumber APBN/APBD dan kekayaan

negara/kekayaan daerah namun ketersediaannya merupakan misi negara sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Sikap Patriotisme

Sikap patriotisme merupakan suatu bentuk cinta dan bangga terhadap tanah air (Mayapada et al., 2021). Nilai-nilai patriotisme tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk upaya membela tanah air guna mewujudkan sikap kesadaran sebagai warga negara untuk ikut serta dalam mempertahankan kesatuan negaranya. Untuk menunjang terbentuknya sikap patriotisme dapat diperoleh melalui pendidikan sekolah dalam mata pelajaran kewarganegaraan maupun kegiatan kepramukaan, peran orangtua dalam memberikan pendidikan dini, pendidikan masyarakat, dan lain sebagainya (Yuliani & Wijaya, 2021). Hakikatnya, patriotisme adalah sebuah acuan maupun prinsip yang dijadikan warga negara sebagai cerminan bentuk cinta bangsa yang kemudian menimbulkan kesediaan/rela berkorban demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Sulianti, 2018).

Hak dan kewajiban warga negara terkait pertahanan dan keamanan negara tidak semata-mata terbentuk begitu saja namun telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 30 ayat (1) yang intinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut menandakan betapa pentingnya nilai patriotisme dalam diri masyarakat demi keselamatan bangsa dari

ancaman yang dapat merusak moral dan keutuhan bangsa (Putri et al., 2015). Hingga akhirnya, sikap patriotisme yang tertanam dalam diri masyarakat akan meningkatkan kerjasama antarsesama warga negara dalam menghadapi keberanekaragaman suku dan budaya karena latar belakang identitas sosial serta sejarah negara yang sama.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam (Bruner et al., 2017) dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan gender yang dapat mempengaruhi kecenderungan pada ketersediaan barang publik yang erat kaitannya terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Dengan menggunakan metode penelitian analisis regresi, temuan kajian yang dilakukan di tiga negara Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan adanya indikasi perbedaan margin ekstensif dan intensif. Hal tersebut didukung dengan analisis data dimana laki-laki cenderung untuk tidak melaporkan pendapatannya dan meskipun melaporkan, mereka akan cenderung menghindari kewajiban perpajakannya.

Sementara pada (Lauletta & Campos, 2018) meneliti mengenai pengaruh adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dinilai dari dimensi kekayaan dan juga barang publik terhadap meningkatnya kepatuhan pajak para wajib pajak yang terdaftar di negara Argentina. Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi dan menghasilkan temuan bahwa pengampunan pajak menyebabkan penurunan kepatuhan pajak bagi para wajib pajak yang memiliki kekayaan lebih dan juga bagi para wajib pajak yang memiliki akses rendah untuk menikmati barang publik. Penelitian ini menjelaskan hal-hal

yang bersifat ambigu terhadap kajian empiris yang sudah ada sebelumnya mengenai efek penghindaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa adanya heterogenitas wajib pajak akan menimbulkan tanggapan yang semakin berbeda terhadap kepatuhan pajak.

Berbeda dari kedua kajian sebelumnya, dalam penelitian (Putra, 2018) lebih kepada faktor internal dari dalam diri wajib pajak yaitu mengenai patriotisme, komitmen, dan juga kapitulasi terhadap kepatuhan pajak dalam melaporkan SPT. Dengan metode penelitian *Partial Least Square*, data sampel sebanyak 100 wajib pajak didapati bahwa patriotisme yang dideskripsikan sebagai suatu rasa cinta terhadap tanah air juga jiwa nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya, motivasi pembayaran pajak yang didimensikan melalui komitmen dan kapitulasi secara juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terkait patriotisme terhadap kepatuhan pajak diteliti secara lebih lanjut dengan penulis yang sama, dari (Putra & Supartini, 2019). Namun, jika penelitian sebelumnya dilakukan dengan objek wajib pajak orang pribadi, pada penelitian ini lebih dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak pada UMKM. Dengan uji analisis regresi berganda, didapati temuan bahwa adanya penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kewajiban pajak, juga patriotisme pada UMKM dapat berpengaruh positif langsung terhadap kepatuhan perpajakan maupun memoderasi antara penurunan tarif pajak dan kepatuhan pajak sendiri.

Kemudian, dari (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020) yang juga menguji patriotisme terhadap kepatuhan pajak di Yordania khususnya pada penjualan pelaku UMKM Manufaktur, penelitian ini menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modelling* (SEM-PLS) dalam menganalisis datanya. Temuan kajian didapati bahwa *tax audit* dan *tax penalty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak penjualan UMKM Manufaktur di Yordania. Sedangkan *tax rate* tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan pajak, namun patriotisme dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara *tax rate* dengan kepatuhan pajak. Tidak hanya itu, patriotisme juga dapat memperkuat hubungan antara *tax audit* dan *tax penalty* terhadap kepatuhan pajak.

Kembali pada pembahasan barang publik, dalam penelitian (S. Areo et al., 2020) terhadap objek kajian UMKM di Nigeria, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi untuk menguji pengaruh barang dan jasa publik terhadap kepatuhan pajak. Adapun temuan kajian dalam penelitian ini, didapati bahwa peningkatan ketersediaan barang dan jasa publik dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Nigeria. Dengan kata lain, ketersediaan barang dan jasa publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kembali pada pembahasan hubungan patriotisme terhadap kepatuhan pajak, dalam penelitian (Mulya, 2020) pengaruh patriotisme diposisikan sebagai variabel intervening (sebagai penguat atau pelemah hubungan antar variabel independent dan dependen). Penelitian dengan objek wajib pajak

yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong ini diolah dengan metode analisis deskriptif structural dan juga *Partial Least Square Structural Equation Modelling* (SEM-PLS). Temuan dari kajian ini yaitu bahwa otoritas pajak berpengaruh signifikan langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening sikap patriotisme terhadap kepatuhan pajak, sedangkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP) dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sekalipun dengan patriotisme sebagai variabel intervening.

Adapun penelitian yang mengkaji patriotisme dan ketersediaan barang publik secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pada penjualan UMKM yaitu pada penelitian (Alshira'h et al., 2021). Penelitian ini diselenggarakan di Yordania, dan dalam metode penelitiannya menggunakan Partial Least Square. Adapun temuan yang didapati dari penelitian ini adalah Barang publik dan patriotisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak penjualan pada UMKM di Yordania.

Sedangkan, pada (Carrillo et al., 2021) dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penghargaan terhadap kepatuhan pajak dengan memanfaatkan barang publik yang ada di Kotamadya Argentina. Dengan menggunakan metode analisis regresi, temuan kajian didapati bahwa penghargaan pajak melalui ketersediaan barang publik mampu memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepatuhan pajak.

Kemudian, pada penelitian (Mayapada et al., 2021) yang mengkaji mengenai hubungan faktor internal seorang manusia melalui patriotisme dan

juga nasionalisme wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palu, didapati temuan bahwa patriotisme dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun yang berpengaruh signifikan adalah rasa nasionalisme wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji data penelitiannya.

Tabel 2.1 Ringkasan Kajian Terdahulu

No	Judul, Pengarang, dan Tahun	Variabel	Objek Kajian	Hasil Penelitian
1	The Role of Gender in The Provision of Public Goods Through Tax Compliance (Bruner et al., 2017)	Independen: Barang Publik Demografi: Jenis Kelamin Dependen: Kepatuhan Pajak	Tiga negara di Eropa dan Amerika Serikat	Perempuan lebih patuh dalam membayar pajaknya. Kesenjangan gender dalam kepatuhan pajak disebabkan oleh perbedaan margin ekstensif dan intensif.
2	Government Pardons and Tax Compliance: The Importance of Wealth and Access to Public Goods (Lauletta & Campos, 2018)	Independen: Tax Amnesty dengan dimensi heterogenitas - Kekayaan - Barang Publik Dependen: Kepatuhan Pajak	Wajib Pajak yang terdaftar di Argentina	Tax amnesty menyebabkan penurunan kepatuhan pajak pada wajib pajak yang memiliki kekayaan lebih dan akses yang rendah atas barang publik.
3	Pengaruh Patriotisme, Commitment, dan Caputilation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Independen: - Patriotisme - Motivasi Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha kecil, menengah dan mikro di Jakarta Utara	Patriotism, commitment, dan caputilation secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

	Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi (Putra, 2018)			menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan.
4	Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi (Putra & Supartini, 2019)	Independen: Penurunan Tarif Pajak Moderasi: Patriotisme Dependen: Kepatuhan Pajak	200 Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta	Penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan patriotisme mampu memoderasi pengaruh antara penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Moderating Role of Patriotism on Sales Tax Compliance among Jordanian SMEs (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020)	Independen: - Tax Audit - Tax Rate - Tax Penalty Moderasi: Patriotisme Dependen: Kepatuhan Pajak Penjualan	UMKM Manufaktur di Yordania	Tax audit dan tax penalty berhubungan positif terhadap tingkat kepatuhan pajak penjualan, sedangkan tax rate tidak berhubungan signifikan terhadap kepatuhan pajak penjualan. Selain itu, patriotism memoderasi hubungan antara tax audit, tax rate, dan tax penalty terhadap kepatuhan pajak penjualan.

6	Improved Public Services and Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: a Generalized Ordered Logistic Regression (S. Areo et al., 2020)	<p>Independen: Peningkatan Barang dan Jasa Publik</p> <p>Dependen: Kepatuhan Pajak</p>	UMKM di Nigeria	Adanya hubungan positif antara peningkatan barang dan jasa publik terhadap kepatuhan pajak UKM di Nigeria. Selain itu, temuan lain mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kepatuhan pajak UKM di Nigeria dengan pengetahuan pajak, penalti pajak, dan juga kepercayaan pada pemerintah.
7	Effectiveness of MSAP, Fiscus Services and Taxation Sanctions on Tax Obligation Compliance with Patriotism as Intervening Variables (Mulya, 2020)	<p>Independen: - Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP) - Otoritas Pajak - Sanksi Pajak</p> <p>Intervening: Patriotisme</p> <p>Dependen: Kepatuhan Pajak</p>	Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong	Otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan MSAP dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sekalipun dengan patriotisme sebagai variabel intervening.
8	Do Public Governance and Patriotism Matter? Sales Tax Compliance among Small	<p>Independen: - Barang Publik - Patriotisme</p> <p>Dependen: Kepatuhan Pajak</p>	385 UMKM di Yordania	Barang publik dan patriotisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak penjualan pada

	and Medium Enterprises in Developing Countries: Jordanian Evidence (Alshirah et al., 2021)			UMKM di Yordania.
9	Public Good Provision and Property Tax Compliance: Evidence from A Natural Experiment (Carrillo et al., 2021)	Independen: Barang Publik (sebagai penghargaan positif) Dependen: Kepatuhan Pajak	Wajib Pajak di Kotamadya Argentina yang mematuhi pembayaran pajak properti.	Ketersediaan barang publik yang bersifat tahan lama memberikan efek positif terhadap kepatuhan pajak dalam jangka waktu yang lama.
10	The Determinants of Tax Compliance: Loving or Fearing (Mayapada et al., 2021)	Independen: Determinan Internal berupa - Patriotisme - Nasionalisme Determinan Eksternal berupa sanksi pajak Dependen: Kepatuhan Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palu	Semangat patriotisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Adapun sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Ketersediaan Barang Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Pajak memiliki fungsi budgetair yaitu khususnya APBN, menandakan pajak secara umum memiliki pengaruh dalam ketersediaan barang publik. Sesuai yang tercantum dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh (Alshira'h et al., 2021; Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Bruner et al., 2017; Carrillo et al., 2021; Lauletta & Campos, 2018; S. Areo et al., 2020) dimana penelitian-penelitian tersebut yang dilakukan di luar negeri terbukti adanya hubungan antara barang publik dengan kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, minimnya literatur dalam negeri mengenai pengaruh ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam negeri (Indonesia) tentu diperlukan adanya penelitian ulang guna memperluas topik kajian perpajakan di Indonesia secara lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁: Ketersediaan barang publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Sikap Patriotisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Sikap patriotisme yang tumbuh dalam masyarakat atas dasar nilai kemanusiaan yang tinggi akan cenderung menyadari pentingnya hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diatur secara bersama-sama dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU KUP, seluruh warga negara secara tidak langsung memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya guna kepentingan dan kemakmuran bersama. Hal tersebut sejalan dalam penelitian (Alshira'h et al., 2021; Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Mulya, 2020; Putra, 2018; Putra & Supartini, 2019) yang menyatakan adanya temuan bahwa sikap patriotisme dengan kepatuhan pajak meskipun tidak dengan penelitian (Mayapada et al., 2021) yang memiliki hasil bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dipengaruhi oleh sikap patriotisme. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Sikap patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Ketersediaan Barang Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dengan Sikap Patriotisme sebagai Variabel

Pemoderasi

Sikap patriotisme baik sebagai variabel pemoderasi seperti dalam penelitian (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Putra & Supartini, 2019)

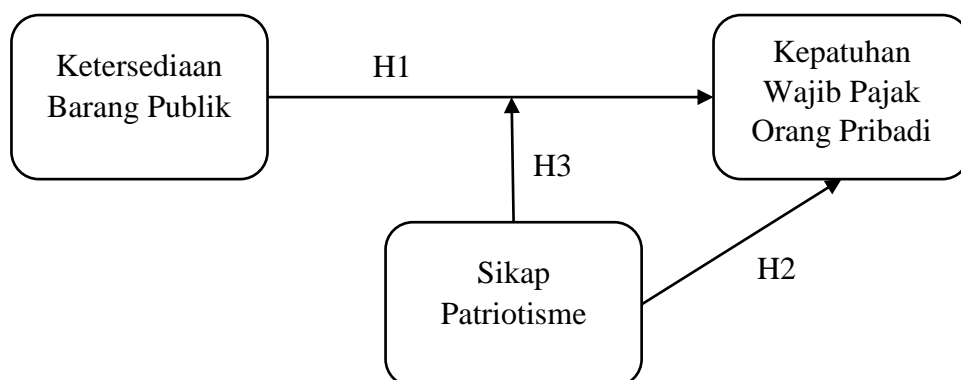
maupun intervening dalam penelitian (Mulya, 2020) menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif. Menandakan sikap patriotisme mampu memperkuat hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H3: Sikap patriotisme mampu memoderasi pengaruh ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4 Kerangka Penelitian

Pengaruh ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sikap patriotisme sebagai variabel pemoderasi antara ketersediaan barang publik dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, dikarenakan penelitian ini digunakan untuk meneliti sampel dalam populasi tertentu. Analisis data yang digunakan berupa analisis yang bersifat statistik guna menguji rumusan hipotesis yang telah dibuat dengan hasil sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan objek maupun subjek dengan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti untuk kemudian dilakukan penelitian guna mendapatkan hasil dan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

3.2.2 Sampel

Dalam (Sugiyono, 2016) disebutkan bahwa sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang digunakan. Adapun teknik penentuan sampling yaitu dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* berarti bahwa siapa saja dapat berpartisipasi pada sebuah penelitian dan peneliti dapat menentukan subjek yang dinilai representatif berdasarkan populasi yang dipilihnya. Dalam penelitian

ini, untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan yaitu dengan Rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Sehingga perhitungan sampel adalah:

$$n = \frac{58.679}{(1 + 58.679(0,1)^2)}$$

$$n = 99,83$$

$$n = 100 \text{ orang (pembulatan)}$$

Sesuai dengan (Fraenkel & Wallen, 2012) yang menyebutkan bahwa besarnya sampel minimum dalam penelitian yang bersifat deskriptif yaitu sebanyak 100.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam setiap pernyataan, responden diberikan 5 (lima) pilihan jawaban dengan skala *likert* yang diberi skor sebagai berikut:

1. Skor 5 = Sangat Setuju
2. Skor 4 = Setuju
3. Skor 3 = Ragu-ragu
4. Skor 2 = Tidak Setuju
5. Skor 1 = Sangat Tidak Setuju

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang bersifat sebagai stimulus. Dengan kata lain, variabel ini adalah variabel bebas yang memengaruhi/menjadi sebab timbulnya perubahan dari variabel dependen (Y) (Sugiyono, 2016). Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini, yaitu ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme.

3.4.1.1 Ketersediaan Barang Publik

Penyediaan barang publik merupakan bentuk transparansi pajak yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Barang publik harus bersifat *non-rival* dan *non-excludable* sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaatnya secara bersama-sama (Andhika, 2017). Dalam (Kaufmann et al., 2007) terdapat indikator penilaian ketersediaan barang publik diantaranya:

1. Kualitas infrastruktur (jalan raya, konstruksi bangunan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dsb.)
2. Kinerja pemerintah dalam menangani pelayanan kesehatan
3. Kinerja pemerintah dalam menangani sistem pendidikan

3.4.1.2 Sikap Patriotisme

Sikap patriotisme merupakan bentuk sikap seorang warga negara yang rela mengorbankan segalanya demi kemakmuran tanah air sebagai bentuk cinta terhadap negaranya (Mayapada et al., 2021).

Seseorang yang dinilai patriotik akan senantiasa menunjukkan sikap berani, pantang menyerah, bangga, dan rela berkorban untuk membela bangsa di atas kepentingan individu dan golongan (Konrad & Qari, 2012).

Dalam (Konrad & Qari, 2012) juga disebutkan indikator penilaian yang mendasari sikap patriotisme yaitu:

1. Sistem demokrasi pemerintah
2. Pencapaian perekonomian negara
3. Prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi negara
4. Keadilan sosial
5. Sistem jaminan sosial
6. Prestasi olahraga
7. Politik yang mampu diakui di kancah Internasional
8. Hukum yang ditegakkan

3.4.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dikenal sebagai variabel terikat, memiliki makna bahwa variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat atas adanya variabel bebas (independen) (Sugiyono, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Alm, 2019; Febriani & Kusmuriyanto, 2015). Penerimaan pajak pemerintah akan dengan mudah dicapai apabila ada peningkatan jumlah wajib pajak yang taat dalam membayarkan pajaknya.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam (Febriani & Kusmuriyanto, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar.
2. Membayar kewajiban pajak sesuai dengan perhitungan sebenarnya.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Tidak memiliki tunggakan pajak.
5. Menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.
6. Taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan.
7. Tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda pajak karena kelalaian.

3.4.3 Variabel Pemoderasi (Z)

Dalam (Sugiyono, 2016), disebutkan bahwa variabel pemoderasi/moderasi memiliki kedudukan yang dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini digunakan atas dugaan adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan ketersediaan barang

publik yang tidak secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di dalam penelitian ini, sikap patriotisme yang merupakan variabel independen (X₂) sekaligus menjadi variabel pemoderasi (Z) dengan indikator pengukuran yang telah disebutkan pada pembahasan variabel sikap patriotisme sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam (Sugiyono, 2016) dijelaskan bahwa angket atau kuesioner adalah sebuah teknik pengumpulan data yang diukur melalui pernyataan maupun pertanyaan tertulis untuk kemudian dijawab oleh responden. Untuk memperoleh data yang bersifat primer mengenai pengaruh ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak, kuesioner pada penelitian ini disebarkan secara *online* melalui *Google Form* kepada responden sebanyak 130 responden. Namun hanya 100 responden yang dianggap memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Validitas dan Reliabilitas

Di dalam (Ghozali, 2018), disebutkan uji validitas berguna untuk pengukuran sah atau validitas dari suatu kuesioner. Data dapat dikatakan valid jika dapat mengungkap variabel secara tepat. Adapun kriteria dalam pengujian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apabila $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (sig. 2-tailed dengan sig. 0,05), dapat diartikan bahwa instrument berkorelasi signifikan atas skor total, dengan demikian dikatakan valid.

2. Apabila $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$ (sig. 2-tailed dengan sig. 0,05), dapat diartikan bahwa instrumen tidak berkorelasi signifikan atas skor total, sehingga dikatakan tidak valid.

Sedangkan, uji reliabilitas yaitu pengujian yang berfungsi untuk mengukur konstruk/indikator dari variabel dalam kuesioner (Ghozali, 2018). Cara untuk mengetahui reliabilitas dapat dilihat melalui nilai Cronbach Alpha dengan α yang dinilai reliabel apabila $> 0,6$ (Ghozali, 2018).

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk menganalisa data dengan menggambarkan/mendeskripsikan data yang dimiliki tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2016).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Dalam (Ghozali, 2018), uji normalitas merupakan sebuah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel, atau residualnya terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Adapun kriterianya yaitu:

1. Berdistribusi normal, jika sig. $> 0,05$
2. Berdistribusi tidak normal, jika sig. $< 0,05$

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Untuk uji multikolinearitas, model regresi yang baik yaitu seharusnya tidak adanya korelasi antar variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat terlihat pada nilai *tolerance* dan juga VIF (*Variance Inflation Factor*). Kriteria pada uji multikolinearitas bisa dilihat dari:

1. Nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* $> 0,01$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas
2. Nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* $< 0,01$ maka dapat dikatakan terdapat multikolinearitas antar variabel independen terhadap model regresi.

(Ghozali, 2018)

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas berfungsi untuk pengujian ada tidaknya kesamaan varians terhadap residual (Ghozali, 2018). Pada uji ini, cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi yaitu dengan melihat grafik scatterplots. Jika pada grafik terlihat titik-titik yang menyebar acak baik dari sumbu x maupun sumbu y dan juga di bawah maupun di atas titik 0, maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi. Selain itu, alternatif pengujian lainnya yaitu dengan uji Glejser, dengan membandingkan nilai signifikansinya. Jika menunjukkan di atas tingkat 5%, dapat diartikan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

3.6.4 Analisis Regresi Berganda

Model analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda yang dilakukan menggunakan bantuan aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 25. Dalam penelitian ini variabel independen (X) yang diteliti terdiri atas ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme, sedangkan variabel dependennya (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta sikap patriotisme sekaligus sebagai variabel pemoderasinya (Z). Analisis linier berganda yang dilakukan pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji pengaruh sikap patriotisme sebagai variabel pemoderasi, pada penelitian ini digunakan uji interaksi *Moderate Regression Analysis* (MRA). Sehingga, perumusan atas persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta Z + \epsilon_i$$

Dengan keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1= Ketersediaan Barang Publik

X2= Sikap Patriotisme

Z = Sikap Patriotisme (X1*X2) (MRA)

3.6.5 Uji Model (Uji F)

Uji F didapatkan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen atas variabel dependen secara simultan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi yang digunakan sebesar 5% ($\alpha=0,05$). Adapun kriteria yang ditetapkan dalam uji t yaitu:

1. H_0 ditolak, jika signifikansi F hitung $> \alpha$ (0,05)
2. H_0 diterima, jika signifikansi F hitung $< \alpha$ (0,05)

3.6.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji signifikansi individual (uji t) berfungsi untuk pengujian besarnya pengaruh masing-masing variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y) secara individual. Uji ini dilakukan melalui pengujian terhadap koefisien regresi yang dihasilkan kemudian membandingkannya dengan nilai signifikansi 5% ($\alpha=0,05$). Adapun kriteria yang ditetapkan dalam uji t yaitu:

3. H_0 ditolak, jika signifikansi t hitung $> \alpha$ (0,05)
4. H_0 diterima, jika signifikansi t hitung $< \alpha$ (0,05)

3.6.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai dalam koefisien determinasi yaitu antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Apabila nilai R^2 mendekati nol maka menandakan bahwa kemampuan variabel independen untuk menguraikan variabel dependen sangat terbatas. Semakin besar (mendekati satu) nilai adjusted R^2 menandakan bahwa variabel independen memberikan

keterangan yang dibutuhkan dalam memprediksi banyaknya variasi atas variabel dependen (Ghozali, 2018).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian tentang pengaruh ketersediaan barang publik serta efek moderasi dari sikap patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini telah dilakukan pada 100 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebagai responden. Bab IV ini memuat hasil pengujian kualitas data yang berupa hasil analisis validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. Hasil uji-uji tersebut disajikan sebagai berikut:

4.1.1 Analisis Validitas dan Reliabilitas

Analisis validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antar masing-masing indikator dengan nilai total skor yang telah dikoreksi dengan nilai skor indikator masing-masing itu sendiri, sehingga diperoleh nilai *corrected total item correlation* atau nilai r hitung. Kemudian nilai r hitung tersebut dibandingkan dengan nilai r tabel. Besarnya nilai r tabel untuk jumlah sampel (n) = 100 pada tingkat signifikansi 5% (0,05) yaitu 0,197. Maka, indikator variabel akan dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung $> 0,197$. Hasil uji validitas indikator tiap variabel ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Validitas Indikator Variabel Penelitian

Variabel dan Indikator	rhitung	Keterangan
Ketersediaan barang publik (X1)		
1. Kualitas infrastruktur umum (X1.1)	0,404	Valid
2. Penanganan pelayanan kesehatan (X1.2)	0,410	Valid
3. Penanganan sistem pendidikan (X1.3)	0,438	Valid
Sikap patriotisme (X2)		
1. Sistem demokrasi (X2.1)	0,686	Valid
2. Pencapaian perekonomian (X2.2)	0,676	Valid
3. Prestasi Iptek (X2.3)	0,515	Valid
4. Keadilan sosial (X2.4)	0,673	Valid
5. Sistem jaminan sosial (X2.5)	0,676	Valid
6. Prestasi olahraga (X2.6)	0,457	Valid
7. Pengakuan politik (X2.7)	0,680	Valid
8. Penegakan hukum (X2.8)	0,628	Valid
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)		
1. Melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar (Y1)	0,582	Valid
2. Membayar pajak sesuai perhitungan (Y2)	0,569	Valid
3. Mengisi SPT lengkap, jelas, dan benar (Y3)	0,698	Valid
4. Tidak memiliki tunggakan pajak (Y4)	0,600	Valid
5. Menyampaikan SPT tepat waktu (Y5)	0,677	Valid
6. Patuh pada ketentuan perpajakan (Y6)	0,668	Valid
7. Tidak pernah mendapat sanksi/denda pajak (Y7)	0,658	Valid

Sumber: data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari tiap-tiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dikarenakan memiliki nilai r hitung diatas 0,197. Kemudian pada analisis berikutnya yaitu uji reliabilitas variabel yang dianalisis dengan koefisien *Cronbach Alpha*, variabel dinyatakan memenuhi karakteristik reliabel apabila koefisien *Cronbach Alpha* $>$ 0,60. Hasil uji reliabilitas variabel ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Analisis Reliabilitas Variabel

Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	<i>Cut off</i>	Keterangan
Ketersediaan barang publik (X1)	0,607	0,60	Reliabel
Sikap patriotisme (X2)	0,869	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,864	0,60	Reliabel

Sumber: data primer diolah (2022)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ketiga variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien Cronbach Alpha $> 0,60$. Berdasarkan analisis validitas dan reliabilitas didapatkan hasil bahwa semua indikator dapat mewakili setiap variabel yang diteliti, sehingga tidak ada indikator yang dibuat atau dikeluarkan dari analisis lebih lanjut.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif terdiri atas analisis gambaran karakteristik responden dan variabel penelitian. Hasil analisis diuraikan sebagai berikut:

4.1.2.1 Karakteristik Responden

Gambaran karakteristik responden ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden	Frequency	Percentage (%)
<u>Jenis kelamin</u>		
Laki-laki	52	52,0
Perempuan	48	48,0
<u>Usia (tahun)</u>		
≤ 20	1	1,0
21-30	33	33,0
31-40	27	27,0
41-50	16	16,0
51-60	23	23,0
≥ 61	1	1,0
<u>Pendidikan</u>		
SD		
SMP		
SMA/SMK	24	24,0
D3	17	17,0
S1	52	52,0
S2	4	4,0
Lainnya	3	3,0
<u>Pekerjaan</u>		
PNS	20	20,0
TNI/POLRI	5	5,0
Pegawai BUMN	34	34,0
Pegawai Swasta	13	13,0
Wirausaha	9	9,0
Lainnya	19	19,0
<u>Penghasilan/bulan</u>		
≤ Rp2.000.000	6	6,0

Karakteristik responden	Frequency	Percentage (%)
Rp2.000.001 – Rp5.000.000	26	26,0
Rp5.000.001 – Rp8.000.000	24	24,0
Rp8.000.001 – Rp10.000.000	19	19,0
≥ Rp10.000.001	25	25,0

Sumber: data primer diolah (2022)

Karakteristik wajib pajak orang pribadi menurut jenis kelamin relatif sama yaitu 52% laki-laki dan 48% perempuan. Kelompok usia terbanyak di rentang 21-30 tahun yaitu sebanyak 33% dan yang paling sedikit pada usia <21 tahun sebanyak 1%. Pendidikan responden terbanyak adalah S1 dengan jumlah 52% dan yang paling sedikit adalah jenis pendidikan lain yaitu sebanyak 3%. Jenis pekerjaan wajib pajak terbanyak yaitu pegawai BUMN (34%) dan yang paling sedikit yaitu TNI/POLRI (5%). Tingkat penghasilan/bulan paling banyak dari responden yaitu di kisaran Rp2.000.001 – Rp5.000.000 pada 26% responden, sedangkan yang paling sedikit adalah responden dengan penghasilan/bulan sebesar \leq Rp2.000.000 pada 6% responden.

4.1.2.2 Variabel Penelitian

Gambaran variabel penelitian disajikan berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) skor jawaban dari setiap indikator dan juga setiap variabel. Skor jawaban dikelompokkan menjadi tiga interval kelas dengan kategori rendah, sedang dan tinggi sesuai alternatif skor jawaban tertinggi (5) dan terendah (1) sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Jawaban tertinggi} - \text{jawaban terendah}}{\text{Jumlah kategori}}$$

$$\text{Interval kelas} = \frac{5-1}{3} = \frac{4}{3} = 1,33$$

Sehingga pengkategorian indikator variabel atau variabel adalah sebagai

berikut:

Interval kelas	Kategori
1,00 - 2,33	Rendah
2,34 – 3,67	Sedang
3,68 – 5,00	Tinggi

Deskripsi variabel penelitian ini disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Ketersediaan Barang Publik

Indikator	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar deviasi
1. Kualitas infrastruktur umum (X1.1)	3	5	4,37	0,677
2. Penanganan pelayanan kesehatan (X1.2)	3	5	4,15	0,642
3. Penanganan sistem pendidikan (X1.3)	3	5	4,34	0,742
Keseluruhan	3	5	4,29	0,515

Sumber: data primer diolah (2022)

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa ketiga indikator dari variabel ketersediaan barang publik yang meliputi kepuasan wajib pajak terhadap kualitas infrastruktur umum, penanganan pelayanan kesehatan, dan penanganan sistem pendidikan dipersepsikan tinggi (rata-rata skor di antara 3,67 – 5,00) sehingga persepsi terhadap ketersediaan barang publik yang didapatkan juga tinggi.

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sikap Patriotisme

Indikator	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar deviasi
1. Sistem demokrasi (X2.1)	1	5	3,36	0,811
2. Pencapaian perekonomian (X2.2)	2	5	3,28	0,792
3. Prestasi Iptek (X2.3)	2	5	3,54	0,784
4. Keadilan sosial (X2.4)	2	5	3,20	0,816
5. Sistem jaminan sosial (X2.5)	1	5	3,37	0,812
6. Prestasi olahraga (X2.6)	2	5	3,59	0,767
7. Pengakuan politik (X2.7)	1	5	3,10	0,969
8. Penegakan hukum (X2.8)	1	5	3,01	0,969
Keseluruhan	2	5	3,31	0,609

Sumber: data primer diolah (2022)

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa semua indikator dari variabel sikap patriotisme yang meliputi kepuasan terhadap sistem demokrasi, pencapaian perekonomian prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, keadilan sosial, sistem jaminan sosial, prestasi olahraga, pengakuan politik di kancah internasional, serta penegakan hukum dipersepsikan sedang oleh para responden (rata-rata skor di antara 2,34 – 3,67), sehingga secara keseluruhan sikap patriotisme yang ditunjukkan oleh wajib pajak juga tergolong sedang dengan nilai rata-rata sebesar 3,31.

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar deviasi
1. Melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar (Y1)	2	5	4,04	0,764
2. Membayar pajak sesuai perhitungan (Y2)	1	5	4,28	0,621
3. Mengisi SPT lengkap, jelas, dan benar (Y3)	2	5	4,26	0,661
4. Tidak memiliki tunggakan pajak (Y4)	3	5	4,53	0,594
5. Menyampaikan SPT tepat waktu (Y5)	2	5	4,38	0,663
6. Patuh pada ketentuan perpajakan (Y6)	2	5	4,42	0,684
7. Tidak pernah mendapat sanksi/denda pajak (Y7)	2	5	4,42	0,713
Keseluruhan	3	5	4,33	0,500

Sumber: data primer diolah (2022)

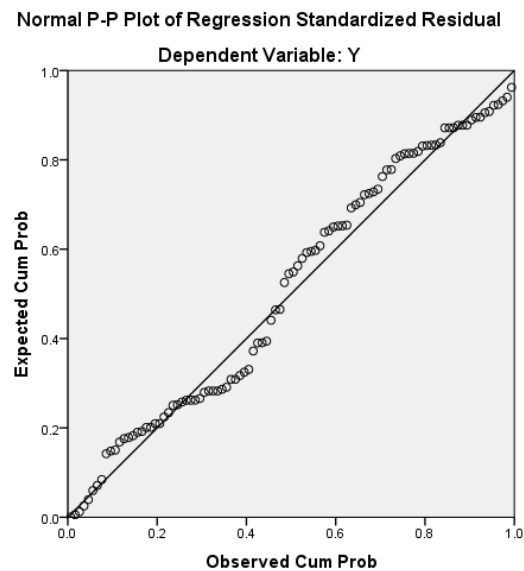
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tergolong tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,33 (di rentang nilai 3,67 – 5,00). Hal tersebut disebabkan karena persepsi wajib pajak terhadap tiap indikator kepatuhan wajib pajak juga mendapat penilaian yang juga tinggi.

4.1.3 Analisis Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Model regresi menyaratkan asumsi data residual yang berdistribusi normal. Asumsi normalitas model regresi pada penelitian dianalisis secara grafik dengan grafik normal p-plot dan secara statistik dengan uji *Kolmogorov Smirnov*, dengan hasil ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot



Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 4.1 tampak bahwa data-data penelitian tampak ada yang menyebar sedikit jauh dari garis diagonal sehingga masih samar apakah model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas residual atau tidak. Guna mendukung bahwa asumsi normalitas residual model regresi tersebut terpenuhi maka dilakukan uji normalitas secara statistik dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hasil ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Asumsi Normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std0, Deviation	0,47896569
Most Extreme Differences	Absolute	0,082
	Positive	0,082
	Negative	-0,077
Test Statistic		0,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,097

Sumber: Data primer diolah (2022)

Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai *sig.* sebesar 0,097 dimana nilai *sig.* tersebut di atas 0,05 sehingga dinyatakan bahwa model regresi memenuhi telah terdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keberadaan korelasi antar variabel bebas. Model regresi dinyatakan terbebas dari gejala multikolinieritas jika dari nilai *tolerance* di atas 0,01 atau nilai VIF kurang dari 10. Pada penelitian ini hasil uji multikolinieritas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.988	1,012
X2	0.988	1,012

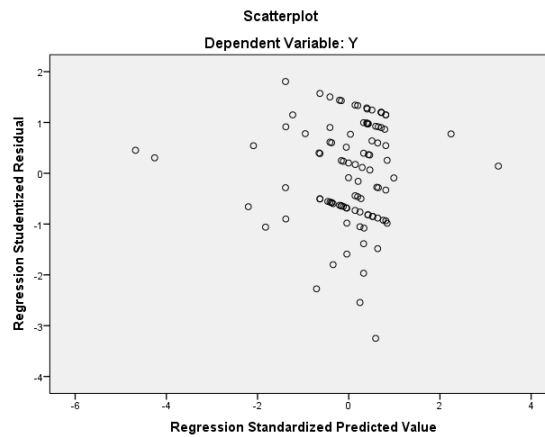
Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan nilai *tolerance* didapatkan nilai $> 0,01$ untuk ketiga variabel bebas dan nilai $VIF < 10$. Hasil tersebut menandakan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas

Asumsi bebas heteroskedastisitas pada penelitian ini dibuktikan dengan uji grafik scatter plot yang hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2 Grafik Scatter-Plot



Sumber: Data primer diolah (2022)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas dimana tampak pada grafik scatter plot terlihat plot-plot yang menyebar tidak membentuk pola dan berada di atas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Pembuktian bebas dari asumsi heteroskedastisitas juga dianalisis dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser

Variabel	t	Sig.
X1	1,051	0,296
X2	0,865	0,389

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji Glejser juga didapatkan hasil bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, karena tiap-tiap

variabel bebas tidak signifikan terhadap nilai absolut residual (sig. di atas 0,05).

4.1.4 Analisis Regresi

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini terdiri atas uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi simultan serta parsial. Hasil analisis disajikan sebagai berikut:

4.1.4.1 Uji Model (Uji F)

Uji F merupakan pengujian signifikansi pengaruh semua variabel bebas secara simultan atau bersamaan. Hasil uji F dari model regresi ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji F

Regresi	F	Sig.
I	2,108	0,127
II	2,825	0,043

Ket: Regresi I = regresi antara X1 dan X2, regresi II = regresi antara X1, X2 dan X1*X2

Sumber: Data primer diolah (2022)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada regresi I pengujian serentak pengaruh ketersediaan barang publik (X1) dan sikap patriotisme (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) tidak signifikan (sig > 0,05). Sedangkan pada regresi II pengujian pengaruh serentak dari ketiga variabel bebas yang terdiri atas ketersediaan barang publik (X1), sikap patriotisme (X2), dan interaksi keduanya (X1*X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah signifikan (sig < 0,05). Sehingga dalam pengujian

hipotesis model regresi yang digunakan adalah regresi kedua seperti pembahasan berikut.

4.1.4.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji T adalah pengujian signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, yang juga merupakan hasil pembuktian dari hipotesis penelitian. Hasil uji T dari model regresi ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji t

Variabel	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
X1	1,037	2,252	0,027
X2	1,590	2,261	0,026
X1*X2	-1,608	-2,030	0,045

Sumber: Data primer diolah (2022)

Pada Tabel 4.11 didapatkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Pengujian H1

Pada uji T regresi: H1 diterima, karena nilai sig yang didapatkan sebesar 0,027 ($\text{sig} < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan barang publik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ketika ada interaksi antara ketersediaan barang publik dengan sikap patriotisme ($X1 * X2$).

b. Pengujian H2

Pada uji T regresi: H2 diterima, karena nilai sig yang didapatkan sebesar 0,026 ($\text{sig} < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa sikap patriotisme dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ketika diujikan bersama dengan

interaksi antara ketersediaan barang publik dengan sikap patriotisme ($X1 * X2$).

c. Pengujian H3

H3 dalam penelitian ini yang ditunjukkan dalam model regresi MRA yaitu diterima, artinya bahwa sikap patriotisme memoderasi hubungan antara ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkannya nilai t hitung sebesar -2,030 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai -t tabel (-1,984) dan nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,045 (sig. < 0,05).

Berdasarkan Tabel 4.11 juga dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,037X1 + 1,590X2 - 1,608Z$$

Dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi ketersediaan barang publik ($X1$) sebesar 1,037 bernilai positif, artinya setiap kenaikan satu satuan ketersediaan barang publik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,037 begitupun sebaliknya, penurunan satu satuan ketersediaan barang publik akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Nilai koefisien regresi sikap patriotisme ($X2$) sebesar 1,590 bernilai positif, artinya peningkatan satu satuan sikap patriotisme akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,590, begitu

juga sebaliknya penurunan satu satuan sikap patriotisme akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,590.

3. Nilai koefisien regresi moderasi sikap patriotisme (Z) pada ketersediaan barang publik sebesar 1,608 bernilai negatif, artinya peningkatan satu satuan interaksi antara ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,608 atau sebaliknya penurunan satu satuan interaksi antara ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,608.

4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi yaitu pengujian seberapa besar kemampuan prediksi variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji koefisien determinasi merupakan hasil uji dari model regresi linier berganda yang melibatkan variabel ketersediaan barang publik (X_1), sikap patriotisme (X_2), dan interaksi keduanya ($X_1 * X_2$) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hasil uji ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,285 ^a	0,081	0,052	0,486

a. Predictors: (Constant), $X_1 * X_2$, X_1 , X_2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil SPSS *model summary* di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,052. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas (ketersediaan barang publik, sikap patriotisme, dan interaksi keduanya)

hanya dapat menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 5,2% dan sisanya yaitu 94,8% (100% - 5,2%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ikut dilibatkan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

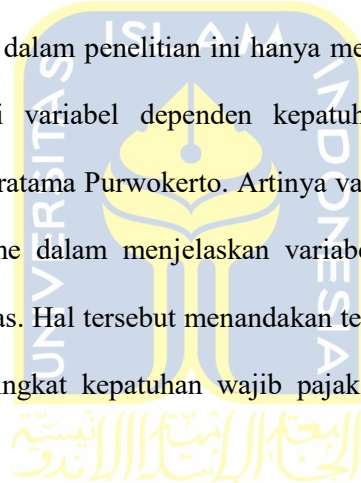
Dari hasil pengujian hipotesis pertama yang telah disebutkan, menandakan bahwa penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di luar negeri yaitu (Alshira'h et al., 2021; Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Bruner et al., 2017; Carrillo et al., 2021; Lauletta & Campos, 2018; S. Areo et al., 2020) yang menyatakan adanya hubungan antara ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak di masing-masing wilayah penelitian. Adanya hubungan signifikan positif menandakan bahwa meningkatnya ketersediaan barang publik juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sama halnya, variabel sikap patriotisme juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto. Sehingga penelitian ini tidak dapat didukung dengan penelitian (Mayapada et al., 2021) yang menyatakan tidak adanya hubungan signifikan antara sikap patriotisme dan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Alshira'h et al., 2021; Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Mulya, 2020; Putra, 2018; Putra & Supartini, 2019) yang mendukung penelitian ini yaitu dengan hasil adanya pengaruh signifikan antara sikap patriotisme sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Lain halnya, dalam pengujian hipotesis yang ketiga yaitu pengujian hipotesis *moderating*. Sikap patriotisme sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian didapatkan hasil bahwa interaksi antar sikap patriotisme dan ketersediaan barang mampu secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara negatif.

Artinya dalam penelitian ini sikap patriotisme sebagai variabel pemoderasi bersifat memperlemah hubungan antara ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menjadikan hasil penelitian yang berbeda dengan (Alshira'h et al., 2021; Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Putra & Supartini, 2019) yang menyatakan bahwa sikap patriotisme memiliki hubungan positif signifikan. Dengan kata lain sikap patriotisme dalam ketiga penelitian ini bersifat memperkuat hubungan masing-masing variabel independen di setiap penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dinyatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya memiliki kemampuan sebesar 5,2% untuk memengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di KPP Pratama Purwokerto. Artinya variabel ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi cukup terbatas. Hal tersebut menandakan terdapat faktor lain yang lebih kuat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketersediaan barang publik dan sikap patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sikap patriotisme sekaligus sebagai variabel pemoderasi. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketersediaan barang publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto.
2. Sikap patriotisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto.
3. Sikap patriotisme dapat memoderasi (memperlemah) hubungan antara ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Purwokerto.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang dijumpai oleh penulis baik dari segi waktu maupun penulisan. Dengan demikian peneliti menerima kritik maupun saran yang diberikan guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah bersama dengan Otoritas Pajak yaitu Dirjen Pajak, diharapkan dapat memberikan transparansi terkait alokasi dana

yang diperoleh dari pajak. Sehingga masyarakat semakin menyadari dan merasa andil dalam pembayaran pajak demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Hal tersebut akan meminimalisir adanya pihak-pihak yang tidak berkontribusi dalam pembangunan negara namun tetap menginginkan untuk menikmati fasilitas dan layanan publik yang disediakan gratis oleh negara, atau yang biasa disebut dengan *free riders*.

2. Diharapkan bagi para peneliti yang akan meneliti menggunakan topik yang sama untuk dapat mengkaji ulang mengenai hubungan variabel ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya literatur dalam negeri terkait ketersediaan barang publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dapat juga menambahkan variabel lain yang kemudian dinilai mampu menjelaskan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak secara lebih lanjut.
3. Adanya keterbatasan jumlah sampel yang digunakan, diharapkan kedepannya bagi peneliti yang berminat mengkaji topik yang sama supaya dapat meningkatkan jumlah sampel guna hasil penelitian yang dinilai lebih mewakili keadaan populasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Ajzen, I. (1991). Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 389–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0139>
- Alshira'h, A. F., Al-Shatnawi, H. M., Al-Okaily, M., Lutfi, A., & Alshirah, M. H. (2021). Do public governance and patriotism matter? Sales tax compliance among small and medium enterprises in developing countries: Jordanian evidence. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 431–455. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2020-0004>
- Andhika, L. R. (2017). Public Goods Bukankah Untuk Rakyat? *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 41. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i1.697>
- Anggraini, F. (2018). Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem Self Assessment. *Balance Vocation Accounting Journal*, 1(2), 53. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v1i2.476>
- Arviana, N., & Djeni, I. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Pemkab Banyumas. (2020). *LKPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020*.
- Bruner, D. M., D'Attoma, J., & Steinmo, S. (2017). The role of gender in the provision of public goods through tax compliance. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 71, 45–55. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2017.09.001>
- Carrillo, P. E., Castro, E., & Scartascini, C. (2021). Public good provision and property tax compliance: Evidence from a natural experiment. *Journal of Public Economics*, 198. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104422>
- Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–10.
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education (8th ed.)*. McGraw-Hill Companies.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit UNDIP.
- Jazuli, A., & Fatimah, S. (2019). Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kantor Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(November), 220–237.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2007). Growth and governance: A reply. *Journal of Politics*, 69(2), 555–562. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2007.00550.x>
- Kemenkeu. (2021). *Data Direktorat Jendral Pajak Per 31 Desember 2021*.
- Kemenkeu. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 Triliun, Lampau Target APBN 2021*. 04 Januari 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Konrad, K. A., & Qari, S. (2012). The Last Refuge of Scoundrel? Patriotism and Tax Compliance. *Economica*, 79(315), 423–436. <https://doi.org/10.1111/j>
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Lauletta, M., & Campos, F. M. (2018). Governments Pardons and Tax Compliance: The Importance of Wealth and Access to Public Goods. *Revista de Economia Politica de Buenos Aires*, 17(12), 185–205.
- Mayapada, A. G., Muliati, M., Tampang, T., & ... (2021). The Determinants of Tax Compliance: Loving or Fearing. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 122–131. <http://journal.wima.ac.id/index.php/JAKO/article/view/3066>
- Mulya, A. S. (2020). Effectiveness of Msap, Fiscus Services and Taxation Sanctions on Tax Obligation Compliance With Patriotism As Intervening Variables. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(1), 2–3.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Putra, R. J. (2018). Pengaruh Patriotisme, Commitment, dan Caputilation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 14–27.
- Putra, R. J., & Supartini. (2019). Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak

- UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No(2), 1–9.
- Putri, D. S., Halilulloh, & Yanzi, H. (2015). Hubungan Tingkat Pemahaman Konsep Pertahanan dan Keamanan Bangsa Indonesia dengan Sikap Patriotisme. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(1).
- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.17-25>
- S. Areo, O., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). Improved Public Services and Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: A Generalised Ordered Logistic Regression. *Asian Economic and Financial Review*, 10(7), 833–860. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.107.833.860>
- Satyawati, E., & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 31. <https://doi.org/10.21460/jrak.2017.131.278>
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. IKAPI.
- Sulianti, A. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Budaya Multikultural Untuk Menanamkan Sikap Patriotisme Warga Negara. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 48–55. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp48-55>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1542.34-38>
- Yuliani, S., & Wijaya, I. U. (2021). Sikap Patriotime Remaja Melalui Penguatan Pendidikan Sejak Dini pada Keluarga. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 1(1), 22–37. <https://e-journal.lp3kamandanu.com/index.php/educatoria/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

A. Identitas Responden

- 1) Inisial Nama :
- 2) Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- 3) Usia (tahun) : a. ≤ 20 d. 41-50
b. 21-30 e. 51-60
c. 31-40 f. ≥ 61
- 4) Pendidikan : a. SD e. S1
b. SMP f. S2
c. SMA/SMK g. Lainnya...
d. D3
- 5) Penghasilan/bulan : a. \leq Rp2.000.000
b. Rp2.000.001 – Rp5.000.000
c. Rp5.000.001 – Rp8.000.000
d. Rp8.000.001 – Rp10.000.000
e. \geq Rp10.000.001
- 6) Pekerjaan : a. PNS d. Pegawai Swasta
b. TNI/POLRI e. Wirausaha
c. Pegawai BUMN f. Lainnya...

B. Petunjuk Pengisian

- 1) Bacalah setiap pernyataan dengan cermat dan teliti.
- 2) Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya pada diri Anda
- 3) Berilah tanda pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan pilihan Anda.
- 4) Mohon diteliti kembali untuk memastikan semua pertanyaan telah terjawab dan tidak ada yang terlewat satupun
- 5) Keterangan:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 4 = Setuju (S)
2 = Tidak Setuju (TS) 5 = Sangat Setuju (SS)
3 = Ragu-ragu (R)

Penyediaan Barang Publik

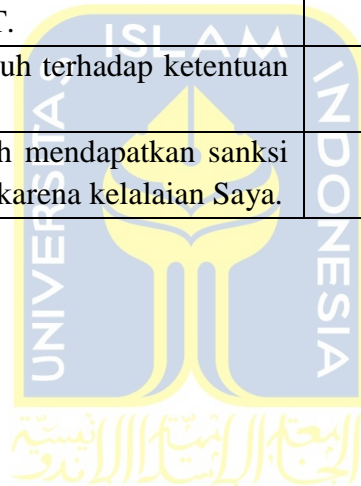
No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1.	Saya merasa puas dengan kualitas infrastruktur umum (jalan raya, konstruksi bangunan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dsb.) di Pemerintah Kabupaten Banyumas					
2.	Saya merasa puas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menangani pelayanan kesehatan					
3.	Saya merasa puas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menangani sistem pendidikan					

Sikap Patriotisme

No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1.	Saya merasa puas dengan sistem demokrasi di Indonesia.					
2.	Saya merasa puas dengan pencapaian perekonomian di Indonesia.					
3.	Saya merasa puas dengan prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.					
4.	Saya merasa adanya keadilan sosial di Indonesia.					
5.	Saya merasa puas dengan sistem jaminan sosial di Indonesia.					
6.	Saya merasa puas dengan prestasi olahraga Indonesia dimata dunia.					
7.	Saya merasa Politik Indonesia mampu diakui di kancah Internasional.					
8.	Saya merasa puas dengan hukum yang ditegakkan di Indonesia.					

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1.	Sebagai Wajib Pajak, Saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar.					
2.	Saya membayar kewajiban pajak Saya sesuai dengan perhitungan sebenarnya.					
3.	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.					
4.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.					
5.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
6.	Saya taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan.					
7.	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda pajak karena kelalaian Saya.					



Lampiran 2. Data Hasil Rekapitan Jawaban Responden

Data Hasil Rekapitan Jawaban Variabel Ketersediaan Barang Publik

Responden	Ketersediaan Barang Publik			Total
	1	2	3	
1	4	4	4	12
2	4	5	5	14
3	4	4	4	12
4	4	5	3	12
5	5	4	4	13
6	5	3	4	12
7	5	5	5	15
8	4	4	5	13
9	4	3	4	11
10	3	5	4	12
11	5	4	3	12
12	3	4	3	10
13	4	4	4	12
14	3	3	4	10
15	5	4	5	14
16	4	4	4	12
17	5	4	3	12
18	5	4	5	14
19	4	4	5	13
20	5	5	5	15
21	3	4	5	12
22	4	4	4	12
23	4	3	5	12
24	4	3	3	10
25	5	4	4	13
26	5	5	5	15
27	4	4	4	12
28	5	4	4	13
29	5	5	5	15
30	5	4	3	12
31	4	4	3	11
32	5	5	4	14
33	4	3	5	12
34	5	4	5	14
35	4	5	5	14

36	5	4	5	14
37	5	3	4	12
38	5	5	5	15
39	4	4	4	12
40	3	4	4	11
41	4	5	5	14
42	5	3	5	13
43	4	4	4	12
44	3	4	3	10
45	4	3	3	10
46	5	4	5	14
47	4	4	5	13
48	5	5	5	15
49	5	4	5	14
50	3	4	4	11
51	4	5	4	13
52	3	3	4	10
53	5	5	5	15
54	3	4	4	11
55	5	5	3	13
56	5	5	5	15
57	4	4	4	12
58	4	4	4	12
59	5	5	5	15
60	3	4	3	10
61	4	3	5	12
62	4	3	3	10
63	5	4	5	14
64	4	4	5	13
65	4	4	3	11
66	5	4	4	13
67	5	5	5	15
68	4	4	5	13
69	4	5	5	14
70	5	5	5	15
71	3	4	4	11
72	5	5	4	14
73	4	4	3	11
74	5	5	5	15
75	5	5	5	15
76	4	3	3	10

77	5	4	5	14
78	5	4	5	14
79	4	4	5	13
80	5	5	5	15
81	5	4	5	14
82	4	4	5	13
83	5	4	5	14
84	5	4	4	13
85	5	4	5	14
86	4	4	4	12
87	4	3	3	10
88	4	4	5	13
89	5	5	5	15
90	4	4	5	13
91	5	4	4	13
92	5	5	5	15
93	5	5	5	15
94	5	4	5	14
95	5	4	4	13
96	4	4	4	12
97	4	5	5	14
98	5	4	4	13
99	5	5	5	15
100	4	4	4	12

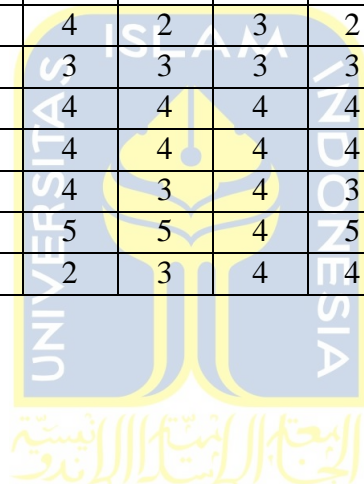
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 الجامعة الإسلامية الأندونيسية

Data Hasil Rekapitan Jawaban Variabel Sikap Patriotisme

Responden	Sikap Patriotisme								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	4	4	4	3	4	3	30
2	3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	4	4	4	3	3	4	3	4	29
4	4	4	4	4	4	3	3	3	29
5	3	3	3	3	3	3	3	3	24
6	3	4	4	4	4	3	3	3	28
7	4	4	4	4	4	3	2	2	27
8	4	2	2	2	4	3	3	3	23
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	4	2	4	2	2	26
12	3	3	3	4	4	4	4	4	28
13	3	3	3	3	3	4	4	4	27
14	3	2	3	3	3	3	4	4	25
15	3	3	3	3	4	4	4	4	28
16	3	2	4	4	4	3	3	3	26
17	4	4	4	4	3	4	3	4	30
18	3	3	4	4	4	3	4	2	27
19	3	3	3	3	3	3	3	3	24
20	4	4	3	4	4	4	3	4	30
21	4	3	3	4	3	3	3	3	26
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	3	3	2	2	2	3	3	3	21
24	3	3	2	3	3	4	3	2	23
25	4	4	4	4	4	4	4	5	33
26	4	3	4	3	4	5	3	4	30
27	5	4	5	2	3	4	2	2	27
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	2	3	4	2	3	4	2	1	21
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	3	3	3	3	3	4	4	3	26
32	2	2	2	2	2	4	3	2	19
33	3	3	4	3	4	4	3	3	27
34	4	4	4	4	5	4	4	3	32
35	2	2	2	4	3	2	2	3	20
36	2	3	3	2	3	4	2	1	20
37	2	2	4	3	2	4	3	1	21
38	3	3	3	3	3	2	3	2	22

39	2	2	2	2	2	3	2	2	17
40	4	3	3	3	3	2	2	2	22
41	4	4	4	4	4	5	5	4	34
42	2	2	4	2	2	4	2	1	19
43	3	4	3	2	2	4	1	3	22
44	3	3	2	2	1	2	2	1	16
45	1	2	4	2	3	3	1	1	17
46	4	4	4	4	4	2	4	3	29
47	3	3	3	3	3	4	4	3	26
48	2	2	2	3	2	2	2	2	17
49	4	3	4	2	3	4	2	2	24
50	3	4	4	3	5	4	4	3	30
51	3	3	3	3	4	4	3	4	27
52	4	5	5	4	4	4	5	4	35
53	4	4	4	3	4	3	3	3	28
54	4	4	4	3	4	4	3	3	29
55	3	2	4	4	3	4	3	1	24
56	2	2	2	2	2	4	3	3	20
57	3	3	4	3	3	4	3	3	26
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	3	3	4	2	3	5	3	2	25
60	3	4	4	3	3	4	2	2	25
61	4	3	4	3	4	3	4	4	29
62	5	4	5	5	4	5	5	5	38
63	4	4	2	3	4	4	2	4	27
64	4	2	2	2	4	4	1	3	22
65	4	4	4	4	4	4	4	3	31
66	4	3	3	3	3	4	2	3	25
67	2	2	3	2	2	3	2	1	17
68	2	2	4	3	3	3	2	3	22
69	2	2	4	2	3	2	2	2	19
70	4	4	4	3	4	4	3	3	29
71	4	4	4	3	3	3	4	4	29
72	3	3	3	3	3	3	3	3	24
73	3	3	4	4	4	4	4	4	30
74	4	5	5	5	5	5	4	3	36
75	3	4	3	2	1	3	3	2	21
76	4	3	4	2	3	4	4	3	27
77	4	4	4	3	4	4	4	3	30
78	3	3	4	3	4	4	3	3	27
79	4	4	4	4	5	4	4	3	32

80	2	2	2	4	3	2	2	3	20
81	4	3	4	3	3	4	3	3	27
82	4	3	4	3	3	3	3	3	26
83	4	4	4	4	4	3	4	3	30
84	3	3	3	3	3	3	3	3	24
85	3	4	4	4	4	4	4	4	31
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32
87	3	3	3	3	4	4	4	4	28
88	4	3	3	3	3	2	2	2	22
89	4	4	4	4	4	5	5	4	34
90	4	4	4	5	3	4	4	4	32
91	3	4	3	2	2	4	1	3	22
92	3	4	4	3	3	4	2	2	25
93	2	2	4	3	3	3	2	3	22
94	2	2	4	2	3	2	2	2	19
95	3	3	3	3	3	3	3	4	25
96	4	4	4	4	4	4	2	2	28
97	4	4	4	4	4	4	4	4	32
98	4	3	4	3	4	3	4	4	29
99	5	4	5	5	4	5	5	5	38
100	4	4	2	3	4	4	2	4	27



Data Hasil Rekapitan Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	5	5	5	5	5	5	4	34
2	4	4	4	3	4	5	4	28
3	3	3	3	5	4	5	4	27
4	3	3	3	4	3	3	3	22
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	4	4	4	4	5	5	5	31
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	5	4	5	5	4	4	31
10	5	5	5	5	5	5	5	35
11	4	4	4	5	5	5	5	32
12	3	4	3	4	3	4	3	24
13	3	4	4	5	5	5	5	31
14	3	4	4	4	4	4	3	26
15	4	4	3	4	4	4	4	27
16	5	5	5	5	5	5	5	35
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	3	4	4	4	3	4	4	26
19	4	4	5	5	5	4	5	32
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	4	4	5	5	5	5	5	33
22	4	4	4	4	4	5	5	30
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	4	4	5	4	4	5	30
25	4	5	5	5	5	5	5	34
26	5	5	4	5	5	5	5	34
27	3	4	5	4	4	5	3	28
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	5	5	5	5	5	4	5	34
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	3	4	3	3	2	3	4	22
32	3	4	4	4	4	4	4	27
33	3	3	3	5	4	5	5	28
34	4	4	5	5	5	5	5	33
35	4	4	5	5	5	5	4	32
36	3	5	4	4	4	4	4	28
37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	4	4	3	5	4	5	5	30

39	4	4	4	3	5	3	3	26
40	3	5	4	5	3	2	3	25
41	4	4	4	5	4	4	5	30
42	5	5	4	5	5	4	4	32
43	5	4	4	5	5	5	5	33
44	4	4	4	3	3	4	5	27
45	3	4	3	5	3	4	5	27
46	4	5	5	5	5	5	5	34
47	3	4	4	5	5	5	5	31
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	2	5	4	5	4	4	5	29
50	5	4	5	5	5	5	5	34
51	5	5	5	4	5	5	4	33
52	5	5	5	5	5	5	5	35
53	3	4	5	5	5	5	5	32
54	4	4	4	5	4	4	4	29
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	5	5	5	5	5	5	5	35
57	4	4	5	4	4	3	4	28
58	5	5	5	5	4	4	5	33
59	4	1	2	4	5	2	2	20
60	5	5	4	5	5	4	4	32
61	4	4	4	4	4	4	4	28
62	5	5	5	5	4	5	5	34
63	2	4	4	4	4	4	2	24
64	4	4	4	4	4	4	4	28
65	4	4	4	4	4	4	4	28
66	4	4	4	4	4	4	4	28
67	4	4	4	5	5	5	5	32
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	3	4	4	4	4	3	3	25
70	3	4	5	5	4	5	5	31
71	5	5	5	5	5	5	5	35
72	5	5	5	5	5	5	5	35
73	4	4	4	5	5	5	5	32
74	4	4	4	5	4	4	5	30
75	5	5	5	5	5	5	5	35
76	4	4	4	5	4	5	5	31
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	5	4	5	5	5	5	5	34
79	5	5	5	4	5	5	4	33

80	5	5	5	5	5	5	5	35
81	3	4	5	5	5	5	5	32
82	4	4	4	4	4	4	4	28
83	4	4	4	4	4	4	4	28
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	4	4	3	4	5	4	28
86	5	5	5	5	5	5	5	35
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	4	5	4	5	5	4	4	31
89	4	4	4	4	4	4	5	29
90	3	4	4	4	3	4	4	26
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	5	4	5	5	5	5	5	34
93	4	5	5	5	5	5	5	34
94	3	5	4	4	4	4	4	28
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	4	4	3	5	4	5	5	30
97	5	5	5	5	5	5	5	35
98	3	4	4	5	5	5	5	31
99	4	4	4	5	4	5	5	31
100	5	5	5	5	5	5	5	35



Data Responden

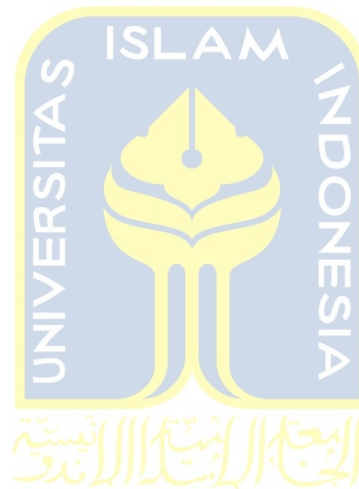
No.	Inisial Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Penghasilan per bulan	Pekerjaan
1	DRS	Laki-laki	21-30	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	PNS
2	SM	Perempuan	41-50	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
3	STR	Laki-laki	21-30	Lainnya	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
4	YR	Perempuan	31-40	S1	≥ Rp10.000.001	Wirausaha
5	ISN	Perempuan	51-60	SMA/SMK	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
6	EBP	Perempuan	21-30	SMA/SMK	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
7	CNT	Perempuan	21-30	D3	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Pegawai BUMN
8	FBA	Laki-laki	31-40	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
9	EKA	Perempuan	31-40	D3	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
10	HR	Laki-laki	51-60	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai Swasta
11	AR	Laki-laki	51-60	SMA/SMK	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
12	ATG	Laki-laki	41-50	SMA/SMK	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai BUMN
13	CAF	Perempuan	31-40	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	PNS
14	PRS	Perempuan	21-30	D3	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai BUMN
15	AME	Perempuan	21-30	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Pegawai Swasta
16	IMDN	Laki-laki	31-40	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
17	TATI	Perempuan	51-60	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai BUMN
18	ARNS	Laki-laki	21-30	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
19	RZK	Perempuan	31-40	D3	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
20	SH	Perempuan	51-60	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
21	AM	Laki-laki	21-30	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
22	NR	Perempuan	21-30	SMA/SMK	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Pegawai BUMN

23	AA	Perempuan	21-30	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
24	IRM	Perempuan	31-40	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Pegawai Swasta
25	HZ	Perempuan	21-30	D3	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai BUMN
26	TS	Laki-laki	41-50	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
27	R	Perempuan	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	PNS
28	FA	Perempuan	31-40	SMA/SMK	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
29	FAP	Perempuan	21-30	SMA/SMK	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Pegawai BUMN
30	ITA	Perempuan	21-30	D3	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
31	WLY	Laki-laki	41-50	SMA/SMK	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
32	HR	Perempuan	31-40	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai Swasta
33	TGH	Laki-laki	41-50	SMA/SMK	≥ Rp10.000.001	Lainnya
34	ASY	Perempuan	41-50	S1	≥ Rp10.000.001	Wirausaha
35	YWT	Laki-laki	51-60	SMA/SMK	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
36	AY	Perempuan	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	PNS
37	EFI	Perempuan	31-40	D3	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
38	DDE	Laki-laki	21-30	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
39	IAM	Laki-laki	51-60	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
40	SHM	Laki-laki	51-60	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	TNI/POLRI
41	LIA	Perempuan	21-30	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	TNI/POLRI
42	HAN	Perempuan	41-50	SMA/SMK	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
43	M	Laki-laki	41-50	SMA/SMK	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
44	DWI	Perempuan	41-50	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Lainnya
45	SPRT	Laki-laki	51-60	SMA/SMK	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Wirausaha
46	AY	Laki-laki	41-50	SMA/SMK	≥ Rp10.000.001	Wirausaha
47	S	Laki-laki	41-50	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Lainnya

48	V	Laki-laki	21-30	SMA/SMK	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Lainnya
49	DL	Perempuan	31-40	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Pegawai BUMN
50	FR	Perempuan	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
51	MRN	Perempuan	51-60	SMA/SMK	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
52	RR	Laki-laki	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	PNS
53	SW	Laki-laki	51-60	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai BUMN
54	A	Perempuan	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
55	PGH	Laki-laki	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai Swasta
56	AFL	Laki-laki	21-30	S1	≤ Rp2.000.000	PNS
57	A	Laki-laki	21-30	SMA/SMK	≤ Rp2.000.000	PNS
58	RD	Perempuan	41-50	S2	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	TNI/POLRI
59	IMJ	Laki-laki	41-50	D3	≥ Rp10.000.001	Pegawai Swasta
60	E	Perempuan	41-50	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Pegawai BUMN
61	AAN	Laki-laki	≥ 61	Lainnya	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai Swasta
62	IND	Perempuan	31-40	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
63	GR	Laki-laki	51-60	SMA/SMK	≥ Rp10.000.001	Pegawai Swasta
64	EBG	Laki-laki	31-40	Lainnya	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	PNS
65	TS	Laki-laki	51-60	D3	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
66	LNN	Laki-laki	51-60	D3	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
67	AH	Perempuan	51-60	D3	≤ Rp2.000.000	Lainnya
68	ARN	Laki-laki	41-50	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
69	MD	Laki-laki	51-60	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
70	HRDP	Perempuan	31-40	S1	≥ Rp10.000.001	PNS
71	ANG	Laki-laki	21-30	S1	≤ Rp2.000.000	Pegawai BUMN
72	KJF	Laki-laki	21-30	D3	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai BUMN

73	AJP	Laki-laki	51-60	S1	≥ Rp10.000.001	Wirausaha
74	IRW	Laki-laki	31-40	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
75	HBW	Laki-laki	31-40	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	TNI/POLRI
76	ARM	Laki-laki	51-60	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
77	ARF	Laki-laki	31-40	S2	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	PNS
78	UPK	Perempuan	31-40	S2	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai BUMN
79	ANS	Perempuan	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya
80	JRP	Perempuan	21-30	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
81	FIR	Laki-laki	31-40	D3	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai Swasta
82	AJGU	Laki-laki	51-60	SMA/SMK	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	TNI/POLRI
83	JL	Perempuan	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	PNS
84	HKS	Perempuan	31-40	SMA/SMK	≤ Rp2.000.000	Wirausaha
85	YS	Perempuan	31-40	D3	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Lainnya
86	IV	Laki-laki	21-30	SMA/SMK	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Pegawai Swasta
87	AZM	Perempuan	31-40	S2	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
88	DYN	Perempuan	31-40	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai Swasta
89	NIT	Laki-laki	21-30	S1	≤ Rp2.000.000	Wirausaha
90	TM	Laki-laki	31-40	SMA/SMK	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	Wirausaha
91	WY	Laki-laki	51-60	S1	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
92	B	Perempuan	31-40	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Wirausaha
93	YNR	Laki-laki	51-60	SMA/SMK	≥ Rp10.000.001	Pegawai BUMN
94	KPT	Laki-laki	31-40	D3	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Lainnya
95	GUNG	Laki-laki	31-40	SMA/SMK	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Pegawai Swasta
96	PTR	Laki-laki	51-60	D3	≥ Rp10.000.001	Pegawai Swasta
97	HANI	Perempuan	21-30	S1	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya

98	AZ	Perempuan	21-30	S1	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	PNS
99	TYO	Laki-laki	41-50	S1	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	Lainnya
100	LZR	Perempuan	51-60	D3	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	Lainnya



Lampiran 3. Klasifikasi Data Responden

Kualifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	52	52%
2	Perempuan	48	48%

Kualifikasi Responden Berdasarkan Usia

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1	≤ 20	1	1%
2	21-30	33	33%
3	31-40	27	27%
4	41-50	16	16%
5	51-60	23	23%

Kualifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1	SMA/SMK	24	24%
2	D3	17	17%
3	S1	52	52%
4	S2	4	4%
5	Lainnya	3	3%

Kualifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1	≤ Rp2.000.000	6	6%
2	Rp2.000.001 – Rp5.000.000	26	26%
3	Rp5.000.001 – Rp8.000.000	24	24%
4	Rp8.000.001 – Rp10.000.000	19	19%
5	≥ Rp10.000.001	25	25%

Kualifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1	PNS	20	20%
2	TNI/POLRI	5	5%
3	Pegawai BUMN	34	34%
4	Pegawai Swasta	13	13%
5	Wirausaha	9	9%
6	Lainnya	19	19%

Lampiran 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	3	5	4.37	.677
X1.2	100	3	5	4.15	.642
X1.3	100	3	5	4.34	.742
X1	100	3	5	4.29	.515
X2.1	100	1	5	3.36	.811
X2.2	100	2	5	3.28	.792
X2.3	100	2	5	3.54	.784
X2.4	100	2	5	3.20	.816
X2.5	100	1	5	3.37	.812
X2.6	100	2	5	3.59	.767
X2.7	100	1	5	3.10	.969
X2.8	100	1	5	3.01	.969
X2	100	2	5	3.31	.609
Y.1	100	2	5	4.04	.764
Y.2	100	1	5	4.28	.621
Y.3	100	2	5	4.26	.661
Y.4	100	3	5	4.53	.594
Y.5	100	2	5	4.38	.663
Y.6	100	2	5	4.42	.684
Y.7	100	2	5	4.42	.713
Y	100	3	5	4.33	.500
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 5. Uji Validitas dan Reliabilitas

Ketersediaan Barang Publik (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.607	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	8.49	1.303	.404	.524
X1.2	8.71	1.359	.410	.518
X1.3	8.52	1.141	.438	.476

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3
X1.1	Pearson Correlation	1	,313**	,351**
	Sig. (2-tailed)		0,002	0,000
	N	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,313**	1	,359**
	Sig. (2-tailed)	0,002		0,000
	N	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,351**	,359**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sikap Patriotisme (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.869	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	23.09	18.325	.686	.846
X2.2	23.17	18.506	.676	.847
X2.3	22.91	19.557	.515	.864
X2.4	23.25	18.371	.673	.848
X2.5	23.08	18.377	.676	.847
X2.6	22.86	20.021	.457	.869
X2.7	23.35	17.321	.680	.847
X2.8	23.44	17.683	.628	.853

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
X2.1	Pearson Correlation	1	,706**	,406**	,501**	,517**	,354**	,455**	,535**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,706**	1	,486**	,521**	,465**	,424**	,424**	,430**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,406**	,486**	1	,445**	,445**	,372**	,407**	0,166
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

X2.4	Pearson Correlation	,501**	,521**	,445**	1	,588**	,213*	,587**	,521**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,033	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,517**	,465**	,445**	,588**	1	,327**	,530**	,534**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,354**	,424**	,372**	,213*	,327**	1	,368**	,345**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,033	0,001		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	,455**	,424**	,407**	,587**	,530**	,368**	1	,633**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	,535**	,430**	0,166	,521**	,534**	,345**	,633**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.864	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	26.29	8.976	.582	.853
Y.2	26.05	9.644	.569	.853
Y.3	26.07	9.015	.698	.835
Y.4	25.80	9.657	.600	.849
Y.5	25.95	9.078	.677	.838
Y.6	25.91	9.012	.668	.839
Y.7	25.91	8.911	.658	.841

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
Y.1	Pearson Correlation	1	,466**	,519**	,309**	,567**	,373**	,414**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,466**	1	,658**	,361**	,352**	,362**	,393**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,519**	,658**	1	,392**	,579**	,515**	,452**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100

Y.4	Pearson Correlation	,309**	,361**	,392**	1	,561**	,491**	,614**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,567**	,352**	,579**	,561**	1	,557**	,407**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	,373**	,362**	,515**	,491**	,557**	1	,690**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	,414**	,393**	,452**	,614**	,407**	,690**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000
	Std. Deviation	.47897
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.077
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.097 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.340	.523		6.380	.000		
	X1	.120	.097	.124	1.236	.220	.988	1.012
	X2	.145	.082	.177	1.767	.080	.988	1.012

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 8. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.580	1.047		-.554	.581
	X1	.251	.238	.500	1.051	.296
	X2	.267	.308	.629	.865	.389
	X1*X2	-.069	.071	-.800	-.977	.331

a. Dependent Variable: abs.res

Lampiran 9. Uji Regresi Berganda

Hasil Analisis Regresi II (Regresi Ketersediaan Barang Publik (X1) dan Sikap Patriotisme (X2) dan Interaksi X1*X2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y))

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1*X2, X1, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.285 ^a	.081	.052	.486	1.860

a. Predictors: (Constant), X1*X2, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.005	3	.668	2.825	.043 ^b
	Residual	22.711	96	.237		
	Total	24.716	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1*X2, X1, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.500	1.960		-.255	.799		
	X1	1.005	.446	1.037	2.252	.027	.045	22.140
	X2	1.305	.577	1.590	2.261	.026	.019	51.636
	X1*X2	-.268	.132	-1.608	-2.030	.045	.015	65.509

a. Dependent Variable: Y